

ABSTRACT

THE NEUTRALITY OF ASN IN HOLDING THE 2019 GENERAL ELECTION IN MUARO JAMBI REGENCY

Based on law Number 5 of 2014 concerning ASN, it is stated that ASN is a profession for civil servants and government employees with work agreements working for government agencies. In addition, ASN also has the right to vote and must be neutral and free from any political influence. The great authority possessed by ASN makes the bureaucracy a dominant source of power. Politically, the role and function of the bureaucracy is very much needed because the bureaucracy has a big role in the process of administering the state, then the ASN can be used as a tool of the rulers so that abuse of power can occur. The purpose of this study is to find out how the neutrality of ASN and the sanctions given to ASN who are not neutral in the implementation of the 2019 General Election in the District Muaro Jambi. The research approach used in this study is qualitative method approach and is presented in a descriptive form, which describes clearly and precisely and systematically on the problems studied. In obtaining principles, ASN is given the right to vote which is realized through the holding of elections. However, during the 2019 General Election in Muaro Jambi Regency, it was found that a number of ASN were involved in practical political activities namely campaigning. The forms of ASN involvement in the campaign vary, such as using facilities related to positions, holding activities/actions that benefit or harm one candidate or pair of candidates during the campaign and make invitations through social media to support one candidate pairs. The phenomenon of ASN involvement in the 2019 General Election in Muaro Jambi Regency indicates that efforts to prevent violations related to the neutrality of ASN are still not going well. The sanctions given to ASN who are proven to have violated are given sanctions in the form of light disciplinary punishment based on PP Number 53 of 2010 Civil Servant Discipline. In order not to repeat similar incidents, it is necessary to take periodic preventive measures for ASN in Muaro Jambi Regency.

Keywords: ASN, neutrality, Election.

INTISARI

NETRALITAS ASN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN MUARO JAMBI

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN menyatakan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selain itu, ASN juga memiliki hak pilih dan harus netral serta bebas dari pengaruh politik manapun. Kewenangan besar yang dimiliki oleh ASN menjadikan birokrasi sebagai sumber kekuatan yang dominan. Secara politis, peran dan fungsi birokrasi sangat dibutuhkan karena birokrasi memiliki peran yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan negara, maka ASN dapat dijadikan salah satu alat penguasa sehingga dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana netralitas ASN dan sanksi yang diberikan kepada ASN yang tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yakni menggambarkan secara jelas dan tepat serta sistematis terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam memperoleh informasi, peneliti menggunakan *purposive sampling technique*. Sebagai wujud dari asas demokratis, ASN diberi hak untuk memilih yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilu. Kendati demikian, pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi didapati sejumlah ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis yakni kampanye. Bentuk keterlibatan ASN dalam kampanye tersebut beragam, seperti menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan, mengadakan kegiatan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon selama kampanye dan melakukan ajakan melalui media sosial untuk mendukung salah satu paslon. Fenomena keterlibatan ASN dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi menandakan bahwa upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait dengan netralitas ASN masih belum berjalan dengan baik. Adapun sanksi yang diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar diberikan sanksi berupa hukuman disiplin ringan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Agar tidak terulang kembali kejadian serupa, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan berkala bagi ASN di Kabupaten Muaro Jambi.

Kata Kunci: ASN, netralitas, Pemilu